



WALIKOTA MAKASSAR

**PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR  
NOMOR 2 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2014**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA MAKASSAR,**

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, maka perlu dilakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2014;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 );
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Tata Cara Penyampaiannya;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2014;
34. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Daerah Kota Makassar tahun 2009 Nomor 4);
35. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
36. Peraturan Walikota Makassar Nomor 69 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;

37. Peraturan Walikota Makassar Nomor 93 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
38. Peraturan Walikota Makassar Nomor 24 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Makassar Nomor 93 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
39. Peraturan Walikota Makassar Nomor 26 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Peraturan Walikota Makassar Nomor 93 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
40. Peraturan Walikota Makassar Nomor 28 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Makassar;
41. Peraturan Walikota Makassar Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintah Kota Makassar;
42. Peraturan Walikota Makassar Nomor 37 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Walikota Makassar Nomor 93 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
43. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar Nomor 1/P.DPRD/XI/2009 tanggal 9 Nopember 2009 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar;
44. Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar Nomor 8/DPRD/IX/2014 tanggal 2 September 2014 tentang Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 menjadi Peraturan Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAKASSAR**

dan

**WALIKOTA MAKASSAR**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014**

**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 semula berjumlah Rp. 2.396.879.800.000,00 bertambah sejumlah Rp. 576.034.963.000,00 sehingga menjadi Rp. 2.972.914.763.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

|  |     |                           |                          |
|--|-----|---------------------------|--------------------------|
| <b>1. Pendapatan</b>   |     |                           |                          |
| 1) Semula  | Rp. | 2.166.929.800.000,00      |                          |
| 2) Bertambah   | Rp. | <u>565.798.090.000,00</u> |                          |
| Jumlah Pendapatan setelah Perubahan                              |     |                           | Rp. 2.732.727.890.000,00 |
| <b>2. Belanja</b>  |     |                           |                          |
| 1) Semula  | Rp. | 2.381.719.454.000,00      |                          |
| 2) Bertambah   | Rp. | <u>576.034.963.000,00</u> |                          |
| Jumlah Belanja setelah Perubahan                                 |     |                           | Rp. 2.957.754.417.000,00 |
| (Defisit) setelah Perubahan                                      |     |                           | Rp. (225.026.527.000,00) |
| <b>3. Pembiayaan</b>   |     |                           |                          |
| a. Penerimaan  |     |                           |                          |
| 1) Semula  | Rp. | 229.950.000.000,00        |                          |
| 2) Bertambah   | Rp. | <u>10.236.873.000,00</u>  |                          |
| Jumlah Penerimaan setelah Perubahan                              |     |                           | Rp. 240.186.873.000,00   |
| b. Pengeluaran   |     |                           |                          |
| 1) Semula  | Rp. | 15.160.346.000,00         |                          |
| 2) Bertambah/(Berkurang)   | Rp. | <u>-</u>                  |                          |
| Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan                             |     |                           | Rp. 15.160.346.000,00    |
| Jumlah Pembiayaan netto setelah Perubahan                        |     |                           | Rp. 225.026.527.000,00   |
| Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan setelah Perubahan | Rp. |                           | -                        |



(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

|  |                          |                          |
|--|--------------------------|--------------------------|
| a. Dana bagi hasil pajak dan bukan pajak                       |                          |                          |
| 1) Semula  | Rp. 69.894.707.000,00    |                          |
| 2) Bertambah   | Rp. 2.541.614.000,00     |                          |
| Jumlah Dana bagi hasil pajak dan bukan pajak setelah Perubahan |                          | Rp. 72.436.321.000,00    |
| b. Dana alokasi umum   |                          |                          |
| 1) Semula  | Rp. 1.114.853.212.000,00 |                          |
| 2) Bertambah/(Berkurang)                                       | Rp. -                    |                          |
| Jumlah Dana alokasi umum setelah Perubahan                     |                          | Rp. 1.114.853.212.000,00 |
| c. Dana alokasi khusus   |                          |                          |
| 1) Semula  | Rp. 64.792.920.000,00    |                          |
| 2) Bertambah/(Berkurang)                                       | Rp. -                    |                          |
| Jumlah Dana alokasi khusus setelah Perubahan                   |                          | Rp. 64.792.920.000,00    |

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

|   |                        |                        |
|---|------------------------|------------------------|
| a. Hibah  |                        |                        |
| 1) Semula   | Rp. -                  |                        |
| 2) Bertambah  | Rp. 4.260.000.000,00   |                        |
| Jumlah Pendapatan hibah setelah Perubahan   |                        | Rp. 4.260.000.000,00   |
| b. Dana Darurat   |                        |                        |
| 1) Semula   | Rp. -                  |                        |
| 2) Bertambah/(Berkurang)  | Rp. -                  |                        |
| Jumlah Dana Darurat setelah Perubahan   |                        | Rp. -                  |
| c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya                        |                        |                        |
| 1) Semula   | Rp. 248.374.597.000,00 |                        |
| 2) Bertambah  | Rp. 15.083.561.000,00  |                        |
| Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya setelah perubahan  |                        | Rp. 263.458.158.000,00 |
| d. Dana penyesuaian dan otonomi khusus  |                        |                        |
| 1) Semula   | Rp. -                  |                        |
| 2) Bertambah  | Rp. 319.102.653.000,00 |                        |
| Jumlah Dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah Perubahan                                |                        | Rp. 319.102.653.000,00 |
| e. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya                       |                        |                        |
| 1) Semula   | Rp. 60.058.788.000,00  |                        |
| 2) Bertambah  | Rp. 2.103.874.000,00   |                        |
| Jumlah Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya setelah Perubahan |                        | Rp. 62.162.662.000,00  |



**Pasal 3**

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

|   |     |                      |                          |
|---|-----|----------------------|--------------------------|
| a. Belanja Tidak Langsung                       |     |                      |                          |
| 1) Semula                                       | Rp. | 912.428.208.000,00   |                          |
| 2) Bertambah                                    | Rp. | 345.892.045.000,00   |                          |
| Jumlah belanja tidak langsung setelah Perubahan |     |                      | Rp. 1.258.320.253.000,00 |
| a. Belanja Langsung                             |     |                      |                          |
| 1) Semula                                       | Rp. | 1.469.291.246.000,00 |                          |
| 2) Bertambah                                    | Rp. | 230.142.918.000,00   |                          |
| Jumlah belanja langsung setelah Perubahan       |     |                      | Rp. 1.699.434.164.000,00 |

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

|   |     |                    |                          |
|---|-----|--------------------|--------------------------|
| a. Belanja pegawai                              |     |                    |                          |
| 1) Semula                                       | Rp. | 885.934.100.000,00 |                          |
| 2) Bertambah                                    | Rp. | 340.730.041.000,00 |                          |
| Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan        |     |                    | Rp. 1.226.664.141.000,00 |
| b. Belanja bunga                                |     |                    |                          |
| 1) Semula                                       | Rp. | 2.032.649.000,00   |                          |
| 2) Bertambah/(Berkurang)                        | Rp. | -                  |                          |
| Jumlah Belanja bunga setelah Perubahan          |     |                    | Rp. 2.032.649.000,00     |
| c. Belanja subsidi                              |     |                    |                          |
| 1) Semula                                       | Rp. | -                  |                          |
| 2) Bertambah/(Berkurang)                        | Rp. | -                  |                          |
| Jumlah Belanja subsidi setelah Perubahan        |     |                    | Rp. -                    |
| d. Belanja hibah                                |     |                    |                          |
| 1) Semula                                       | Rp. | 17.554.000.000,00  |                          |
| 2) Bertambah                                    | Rp. | 5.985.043.000,00   |                          |
| Jumlah Belanja hibah setelah Perubahan          |     |                    | Rp. 23.539.043.000,00    |
| e. Belanja bantuan sosial                       |     |                    |                          |
| 1) Semula                                       | Rp. | 1.150.005.000,00   |                          |
| 2) Bertambah                                    | Rp. | 353.795.000,00     |                          |
| Jumlah Belanja bantuan sosial setelah Perubahan |     |                    | Rp. 1.503.800.000,00     |

|     |  |     |                    |                        |
|-----|--|-----|--------------------|------------------------|
| f.  | Belanja bagi hasil   |     |                    |                        |
|     | 1) Semula  | Rp. | -                  |                        |
|     | 2) Bertambah/(Berkurang)   | Rp. | -                  |                        |
|     | Jumlah Belanja bagi hasil setelah Perubahan                                  |     |                    | Rp. -                  |
| g.  | Belanja bantuan keuangan   |     |                    |                        |
|     | 1) Semula  | Rp. | 757.454.000,00     |                        |
|     | 2) Bertambah/(Berkurang)   | Rp. | 109.246.000,00     |                        |
|     | Jumlah Belanja bantuan keuangan setelah Perubahan                            |     |                    | Rp. 866.700.000,00     |
| h.  | Belanja tidak terduga  |     |                    |                        |
|     | 1) Semula  | Rp. | 5.000.000.000,00   |                        |
|     | 2) (Berkurang)   | Rp. | (1.286.080.000,00) |                        |
|     | Jumlah Belanja tidak terduga setelah Perubahan                               |     |                    | Rp. 3.713.920.000,00   |
| (3) | Belanja Langsung dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja : |     |                    |                        |
| a.  | Belanja pegawai  |     |                    |                        |
|     | 1) Semula  | Rp. | 191.584.535.081,00 |                        |
|     | 2) (Berkurang)   | Rp. | (1.702.808.485,00) |                        |
|     | Jumlah Belanja pegawai setelah Perubahan                                     |     |                    | Rp. 189.881.726.596,00 |
| b.  | Belanja barang dan jasa  |     |                    |                        |
|     | 1) Semula  | Rp. | 756.378.681.739,00 |                        |
|     | 2) Bertambah   | Rp. | 175.167.020.983,00 |                        |
|     | Jumlah Belanja barang dan jasa setelah Perubahan                             |     |                    | Rp. 931.545.702.722,00 |
| c.  | Belanja modal  |     |                    |                        |
|     | 1) Semula  | Rp. | 521.328.029.180,00 |                        |
|     | 2) Bertambah   | Rp. | 56.678.705.502,00  |                        |
|     | Jumlah Belanja modal setelah Perubahan                                       |     |                    | Rp. 578.006.734.682,00 |

**Pasal 4**

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

|                                      |     |                          |                        |
|--------------------------------------|-----|--------------------------|------------------------|
| a. Penerimaan Pembiayaan             |     |                          |                        |
| 1) Semula                            | Rp. | 229.950.000.000,00       |                        |
| 2) Bertambah                         | Rp. | <u>10.236.873.000,00</u> |                        |
| Jumlah penerimaan setelah Perubahan  |     |                          | Rp. 240.186.873.000,00 |
| b. Pengeluaran Pembiayaan            |     |                          |                        |
| 1) Semula                            | Rp. | 15.160.346.000,00        |                        |
| 2) Bertambah/(Berkurang)             | Rp. | <u>-</u>                 |                        |
| Jumlah pengeluaran setelah Perubahan |     |                          | Rp. 15.160.346.000,00  |

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

|  |     |                          |                        |
|--|-----|--------------------------|------------------------|
| a. SILPA tahun anggaran sebelumnya                                       |     |                          |                        |
| 1) Semula  | Rp. | 229.950.000.000,00       |                        |
| 2) Bertambah   | Rp. | <u>10.236.873.000,00</u> |                        |
| Jumlah SILPA tahun anggaran sebelumnya setelah Perubahan                 |     |                          | Rp. 240.186.873.000,00 |
| b. Pencairan dana cadangan   |     |                          |                        |
| 1) Semula  | Rp. | -                        |                        |
| 2) Bertambah/(Berkurang)   | Rp. | <u>-</u>                 |                        |
| Jumlah pencairan dana cadangan setelah Perubahan                         |     |                          | Rp. -                  |
| c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan                       |     |                          |                        |
| 1) Semula  | Rp. | -                        |                        |
| 2) Bertambah/(Berkurang)   | Rp. | <u>-</u>                 |                        |
| Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan |     |                          | Rp. -                  |
| d. Penerimaan pinjaman daerah  |     |                          |                        |
| 1) Semula  | Rp. | -                        |                        |
| 2) Bertambah/(Berkurang)   | Rp. | <u>-</u>                 |                        |
| Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah Perubahan                      |     |                          | Rp. -                  |
| e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman                                 |     |                          |                        |
| 1) Semula  | Rp. | -                        |                        |
| 2) Bertambah/(Berkurang)   | Rp. | <u>-</u>                 |                        |
| Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman setelah Perubahan           |     |                          | Rp. -                  |

|  |     |                   |                       |
|--|-----|-------------------|-----------------------|
| f. Penerimaan piutang daerah   |     |                   |                       |
| 1) Semula  | Rp. | -                 |                       |
| 2) Bertambah/(Berkurang)   | Rp. | -                 |                       |
| Jumlah penerimaan piutang daerah setelah Perubahan   |     |                   | Rp. -                 |
| (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan : |     |                   |                       |
| a. Pembentukan dana cadangan   |     |                   |                       |
| 1) Semula  | Rp. | -                 |                       |
| 2) Bertambah/(Berkurang)   | Rp. | -                 |                       |
| Jumlah pembentukan dana cadangan setelah Perubahan   |     |                   | Rp. -                 |
| b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah  |     |                   |                       |
| 1) Semula  | Rp. | -                 |                       |
| 2) Bertambah/(Berkurang)   | Rp. | -                 |                       |
| Jumlah penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah setelah Perubahan                    |     |                   | Rp. -                 |
| c. Pembayaran pokok utang  |     |                   |                       |
| 1) Semula  | Rp. | 15.160.346.000,00 |                       |
| 2) Bertambah/(Berkurang)   | Rp. | -                 |                       |
| Jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah Perubahan                   |     |                   | Rp. 15.160.346.000,00 |
| d. Pemberian pinjaman daerah   |     |                   |                       |
| 1) Semula  | Rp. | -                 |                       |
| 2) Bertambah/(Berkurang)   | Rp. | -                 |                       |
| Jumlah pemberian pinjaman daerah dan obligasi daerah setelah Perubahan                     |     |                   | Rp. -                 |

**Pasal 5**

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- 1 Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
- 2 Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
- 3 Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- 4 Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
- 5 Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- 6 Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- 7 Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah;
- 8 Lampiran VIII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
- 9 Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah

**Pasal 6**

Walikota menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

**Pasal 7**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.


Diundangkan di Kota Makassar  
pada tanggal 5 September 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR

  
H. IBRAHIM SALEH

Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2014

Dietapkan di Makassar  
pada tanggal 5 September 2014

WALIKOTA MAKASSAR, 

  
MOH. RAMDHAN POMANTO